Kemendikdasmen
BBPPMPV Pertanian



RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI (BBPPMPV) PERTANIAN

2025 - 2029

#PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASMEN RAMAH

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,
PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

@bbppmpvprtanian @bbppmpvpertanian.kemdikbud 08118165003

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan RencanaStrategis Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Pertanian telah disusun.

Renstra BBPPMPV Pertanian disusun berdasarkan pada Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (Ditjen Diksi PKPLK), yang berpedoman pada Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dana Menengah (Kemendikdasmen) Tahun 2025-2029. Dalam proses penyusunannya, Renstra BBPPMPV Pertanian menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BBPPMPV Pertanian selama 5 (lima) tahun mendatang yang berfokus pada pencapaian tujuan strategis serta mengacu pada sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Renstra BBPPMPV Pertanian Tahun 2025-2029 ini merupakan implementasi dari Renstra Kemendikbudristek dan Ditjen Diksi PKPLK sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Lembaga sebagai penggerak sektor pembangunan pendidikan bidang vokasi yang dapat mendukung pencapaian program pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan tahun 2025 hingga tahun 2029.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Renstra BBPPMPV Pertanian ini.

Cianjur, 7 Desember 2025

Kepala

Dr. Yusuf, S.T., M.T.

NIP. 197209102003121004

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL, GRAFIK, BAGAN dan GAMBAR ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Kondisi Umum 3
1.2. Potensi dan Permasalahan 15

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS **26**
2.1. Visi 26
2.2. Misi 26
2.3. Tujuan 27
2.4. Sasaran Kinerja 28

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN **31**
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikdasmen 32
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BBPPMPV Pertanian 33
3.3. Kerangka Regulasi 36
3.4. Kerangka Kelembagaan 36

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN **42**
4.1. Target Kinerja 42
4.2. Kerangka Pendanaan 47

BAB V PENUTUP **49**

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1. Pembagian Wilayah Sasaran Program__4
2. Tabel 1.2. Capaian Kinerja BBPPMPV Pertanian Periode Renstra 2020 – 2024__7
3. Tabel 1.3. Jumlah PTK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Bidang Pertanian Periode 2021-2024 __ 9
4. Tabel 1.4. Pendampingan Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan Tahun 2021 hingga 2024__ 12
5. Tabel 1.5. Model/ Inovasi Pembelajaran yang dikembangkan di Satuan Pendidikan Berbasis Dunia Kerja, Periode 2021 hingga 2024__ 13
6. Tabel 1.6. Jumlah Kesepakatan Kerja Sama antara BBPPMPV Pertanian dengan Mitra Dunia Kerja, periode 2021-2024 __13
7. Tabel 2.1. Tujuan Strategis Kemendikdasmen yang terkait dengan Tugas BBPPMPV Pertanian Tahun 2025 – 2029__27
8. Tabel 2.2. Indikasi Risiko__ 28
9. Tabel 2.3. Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan BBPPMPV Pertanian 2025-2029__ 29
10. Tabel 2.4. Target Kinerja Sasaran Strategis BBPPMPV Pertanian Periode Renstra 2025 – 2029__30
11. Tabel 3.1. Sasaran Strategis Kemendikdasmen dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Prioritas Nasional 4__32
12. Tabel 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi, serta Sasaran Kegiatan Ditjen Diksi PKPLK__32
13. Tabel 3.3. Kerangkka Regulasi Ditjen Diksi PKPLK 2025-2029__36
14. Tabel 4.1. Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 BBPPMPV Pertanian Periode Renstra 2025 – 2029__42
15. Tabel 4.2. Indikator Kinerja Kegiatan 1.2 BBPPMPV Pertanian Periode Renstra 2025 – 2029__43
16. Tabel 4.3. Indikator Kinerja Kegiatan 1.3 BBPPMPV Pertanian Periode Renstra 2025 – 2029 __44
17. Tabel 4.4. Kategori Nilai Kinerja Anggaran__45
18. Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 BBPPMPV Pertanian Periode Renstra 2025 – 2029__46

19. Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kegiatan 2.2 BBPPMPV Pertanian Periode Renstra 2025 – 2029__47
20. Tabel 4.7 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis BBPPMPV Pertanian 2025__47
21. Tabel 4.8 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis BBPPMPV Pertanian 2025 – 2029 __47

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1. Peta Pembagian Wilayah Binaan BPPMPV dan BBPPMPV Di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi PKPLK, tahun 2025__ 5
2. Gambar 1.2. Peta Sebaran SMK Bidang Agribisnis dan Agriteknologi Seluruh Indonesia__ 10
3. Gambar 1.3. Peta Sebaran Jumlah SMK PK Binaan BBPPMPV Pertanian (Seluruh Bidang Keahlian) Bidang Kurikulum dan Manajerial__ 10

DAFTAR GRAFIK dan BAGAN

1. Grafik 1.1. Capaian Kinerja Peningkatan Kompetensi PTK, Penjaminan Mutu dan Pengembangan Model Pembelajaran (dalam Persentase) Periode 2021 – 2024__6
2. Grafik 1.2. Capaian Nilai SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran, Periode 2020 – 2024__8
3. Grafik 1.3. Target, Capaian dan Proyeksi Peningkatan Kompetensi PTK Bidang Pertanian__9
4. Grafik 1.4. Jumlah ASN BBPPMPV Pertanian tahun 2025__15
5. Bagan 3.1. Struktur Organisasi BBPPMPV Pertanian__38

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu amanat utama sebagai tujuan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Hal ini disebutkan secara jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memaknai hal tersebut, maka pembangunan pendidikan pada dasarnya diarahkan pada pencapaian empat tujuan kemerdekaan negara Indonesia. Mengutip dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Tahun 2025-2029, bahwa tujuan pertama, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memiliki implikasi pentingnya menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang kemajemukan bangsa Indonesia dari berbagai segi bersama sejarah keberadaannya, dan kesadaran tentang keberadaan seluruh tumpah darah bersama kekayaan dan tantangannya. Tujuan kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum, memiliki implikasi pentingnya menanamkan sikap peduli pada pemenuhan kebutuhan atas kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyatnya. Tujuan ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, memiliki implikasi tentang pentingnya membangun kehidupan yang cerdas, yaitu kehidupan yang berorientasi pada kebajikan, keunggulan, dan kemajuan berkelanjutan dan terhindar dari segala hal yang merugikan dan/atau merusak, baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Tujuan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, memiliki implikasi atas pentingnya mengembangkan wawasan dan kompetensi kemanusiaan, serta wawasan internasional. Pencapaian keempat tujuan tersebut sangat ditentukan oleh keberhasilan tujuan ketiga yang menjadi tanggung jawab pendidikan nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang ditetapkan dengan Undang-Undang 59 Tahun 2024, bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, salah satu misi (agenda)

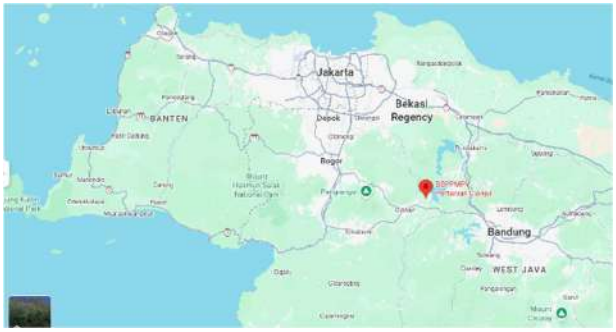
pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Transformasi Sosial, yaitu untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Upaya tersebut dilakukan dengan memastikan pendidikan berkualitas yang merata, sehingga pendidikan menjadi inklusif dan adaptif dengan kualitas dan relevansi pendidikan yang terus meningkat sesuai tuntutan global dan zaman, berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat. Upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah melalui penyediaan layanan pendidikan bermutu untuk semua. Pendidikan bermutu untuk semua diperlukan untuk dapat memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang aspek kewilayahan, gender, kelompok ekonomi-sosial-budaya, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu. Pendidikan bermutu diharapkan menghasilkan lulusan pendidikan yang berkualitas, yang berkeimanan dan berketakwaan terhadap Tuhan YME, berkewarganegaraan, bernalar kritis, kreatif, kolaboratif, mandiri, sehat, dan komunikatif. Untuk itu, diperlukan adanya perencanaan berkualitas yang memuat arah kebijakan, strategi dan program prioritas, yang akan memastikan pelaksanaan pembangunan pendidikan dilaksanakan secara berkesinambungan, partisipatif, dan tepat sasaran.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengembangan Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Pertanian, disusun selaras dengan terbitnya Renstra Kemendikdasmen dan sesuai dengan pedoman teknis penyusunan rencana strategis Kementerian/Lembaga yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Rencana Strategis BBPPMPV Pertanian 2025-2029 memuat rumusan kebijakan dan strategi, tujuan, sasaran strategis, serta program dan kegiatan sebagai dasar pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program dan kebijakan lingkup BBPPMPV Pertanian agar dapat melaksanakan langkah-langkah perlu dilakukan, menyinergikan fungsi dan peran, serta melaksanakan kolaborasi dan kerja sama antar pihak. Renstra ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyusunan program dan kegiatan pengembangan penjaminan mutu serta peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan bidang pertanian di seluruh Indonesia serta pengembangan kerjasama bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan, dan mitra pembangunan pendidikan.

1.1. Kondisi Umum

a. Kedudukan dan Wilayah Binaan BBPPMPV Pertanian

BBPPMPV Pertanian merupakan satuan kerja pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (Ditjen Diksi PKPLK).



Peta Lokasi Kantor BBPPMPV Pertanian

BBPPMPV Pertanian pertama kali dibentuk tahun 2020, sesuai dengan Permendikbud Nomor 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum tahun 2020, Lembaga ini bernama PPPPTK Pertanian sebagai salah satu UPT dibawah Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Peralihan menjadi BBPPMPV Pertanian secara utuh berlaku sejak Tahun Anggaran 2021 hingga 2025. BPPMPV Pertanian berkedudukan di Jalan Jangari km. 14, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karang tengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada lokasi ini, berdiri gedung utama dan penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan luas lahan +/- 539.380m2 yang terdiri 3 sertifikat an. Pemerintah RI yaitu: 1) NUP.1 luas 442.080m2, 2). NUP.2 luas 47.300 m2 dan 3). NUP.3 luas 50.000 m2.

Wilayah pembinaan BBPPMPV Pertanian meliputi seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang Agribisnis dan Agroteknologi, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) khususnya bidang Pertanian yang berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan surat dari Sekretaris Dirjen Pendidikan Vokasi tanggal 31 Maret 2022, nomor 2340/D1/PR.01.04/2022 tentang Pembagian Wilayah Sasaran Program, maka pada sejak tahun 2022, wilayah kerja BBPPMPV Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Pembagian Wilayah Sasaran Program

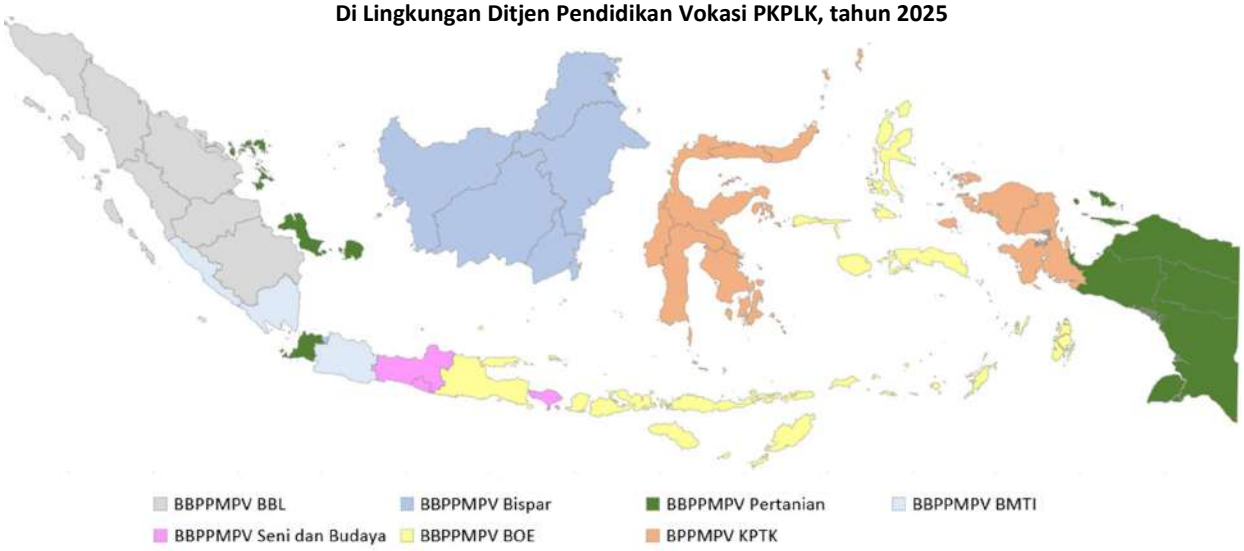
Bidang Pembinaan Peningkatan Kompetensi	Wilayah Kerja Pembinaan SMK
1. Pertanian dan Perikanan (air tawar)	Seluruh Provinsi (34 Provinsi)
2. Manajerial (Pelatihan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan/ PBD, Pendampingan Implementasi Pembelajaran)	7 Provinsi: 1. Provinsi Banten, 2. Provinsi Kepulauan Riau, 3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4. Provinsi Papua 5. Provinsi Papua Tengah 6. Provinsi Papua Pegunungan 7. Provinsi Papua Selatan

No.	Provinsi	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Banten	99	657	756
2	Kepulauan Riau	39	65	104
3	Kepulauan Bangka Belitung	36	22	58
4	Papua	35	14	49
5	Papua Tengah	17	37	54
6	Papua Pegunungan	12	13	25
7	Papua Selatan	21	5	26
			Total	**1072**

Sumber : https://dapo.kemendikdasmen.go.id/sp , Desember, 2025



Gambar 1.1. Peta Pembagian Wilayah Binaan BPPMPV dan BBPPMPV Di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi PKPLK, tahun 2025



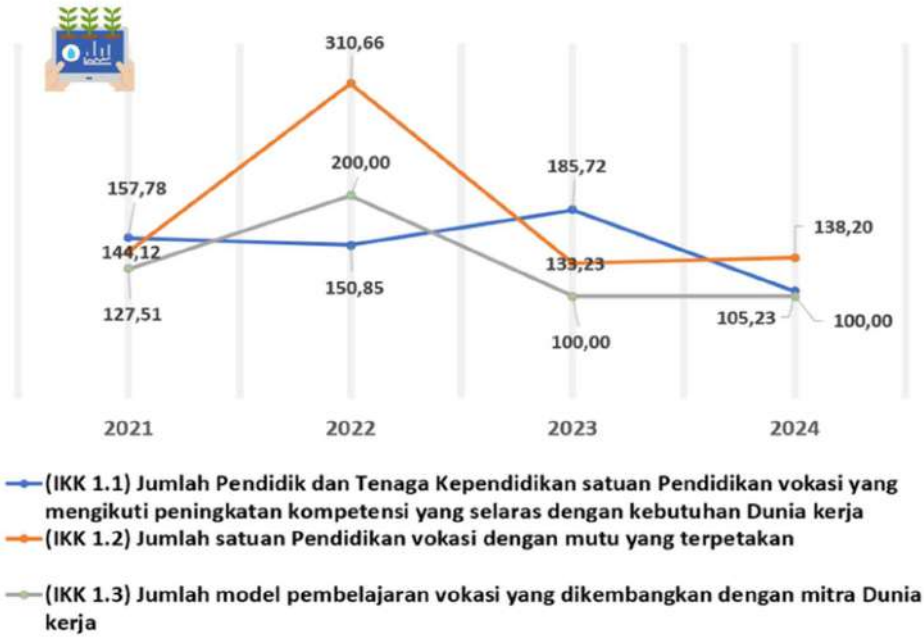
b. Capaian Renstra BBPPMPV Pertanian periode 2020 - 2024

Pelaksanaan tugas pokok BBPPMPV Pertanian dalam meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Pertanian dan Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan telah dilaksanakan hingga tahun 2024. Sejumlah 9.039 Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Pertanian telah mengikuti Peningkatan Kompetensi, 2.820 SMK telah menjadi sasaran dalam program Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan serta 39 Model Pembelajaran telah dikembangkan bersama SMK dan pihak Industri sebagai mitra kerja sama penyelarasan kurikulum.



Aktivitas Peserta pada Peningkatan Kompetensi Guru Kejuruan yang mengikuti *Upskilling* dan *Reskilling* Berbasis Dunia Kerja (Bidang Pengolahan Hasil Pertanian)

Grafik 1.1.
Capaian Kinerja Peningkatan Kompetensi PTK, Penjaminan Mutu dan Pengembangan Model Pembelajaran (dalam Persentase) Periode 2021 - 2024



Sumber: LAKIN BBPPMPV Pertanian, 2024



Suasana Pendampingan Satuan Pendidikan Vokasi pada salah satu Klaster binaan BBPPMPV Pertanian di Provinsi Banten

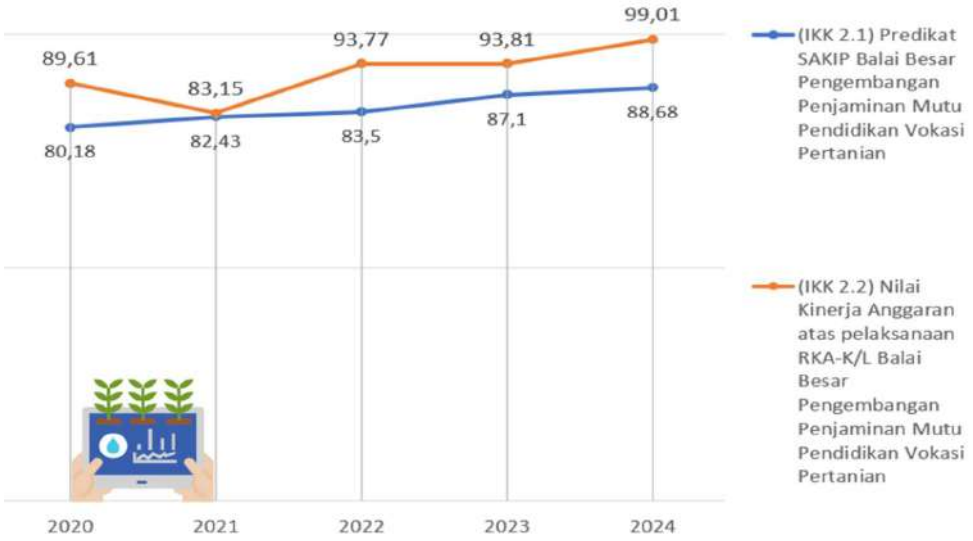
Pada Tabel 1.1. di bawah ini, dibagi dalam 3 baris warna yang menunjukkan adanya perubahan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana yang dituliskan pada Renstra periode tersebut. Dengan demikian, pencapaian kinerja dapat digambarkan pada Grafik 1.1. dan Tabel 1.1. diatas.

Tabel 1.2.
Capaian Kinerja BBPPMPV Pertanian Periode Renstra 2020 – 2024

INDIKATOR KINERJA	Capaian per tahun (Orang)					Capaian Renstra 2020 – 2024 (orang)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak	**4343**					**4343**
IKK 1. Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan Upskilling dan Reskilling berstandar Industri		1348				**1348**
IKK 2. Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri		558				**558**
IKK 3. Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan Teaching Factory		242				**242**
IKS 4. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal predikat BB		A				
IKS 5. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93		93,78				
IKK 1.1. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja			1872	2563	2698	**7133**
IKK 1.2. Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan			991	1054	767	**2823**
IKK 1.3. Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja			4	4	5	**13**
IKK 2.1. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal predikat BB			A	A	A	
IKK 2.2. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93			93,77	93,82	99.01	

Pada fungsi Dukungan Manajemen, BBPPMPV Pertanian mencapai hasil kinerja yang optimal, dengan capaian Nilai Implememntasi SAKIP semula 80,18 (A) pada tahun 2020 menjadi 88,65 (A) pada tahun 2024. Nilai Kinerja Anggaran semula 83,15 (2021) menjadi 99,01 pada akhir periode (2024).

Grafik 1.2.
Capaian Nilai SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran, Periode 2020 - 2024



Sumber: LAKIN BBPPMPV Pertanian, 2024

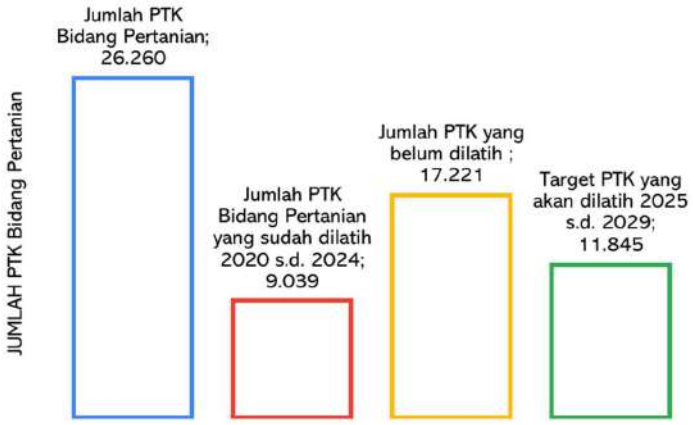
Sepanjang periode Renstra, capaian kinerja BBPPMPV Pertanian pada setiap indikator secara umum menunjukkan adanya peningkatan dalam tren positif, yang menunjukkan bahwa target kinerja telah tercapai dengan peningkatan kualitas yang lebih baik sepanjang periode.

b.1. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pertanian

Program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan tugas utama BBPPMPV Pertanian. Selaras dengan pelaksanaan berbagai kebijakan yang berkembang dan berbagai kondisi eksternal lainnya yang terjadi sepanjang periode Renstra, BBPPMPV Pertanian telah berupaya optimal meningkatkan

kompetensi PTK (Guru Kejuruan Pertanian, Guru Umum, Kepala dan Pengawas Sekolah, Tenaga Kependidikan) SMK Pertanian/ Agribisnis dan Agriteknologi. Berdasarkan data Dapodik *cut off* Desember 2024, maka jumlah PTK bidang Agribisnis dan Agriteknologi seluruh Indonesia adalah sejumlah 26.260 orang, dan yang telah mengikuti berbagai program Peningkatan Kompetensi PTK di BBPPMPV Pertanian (2020-2024) adalah sejumlah 9.039 orang. Jumlah PTK Bidang Pertanian yang akan menjadi sasaran program berikutnya yaitu sejumlah 17.221 orang. Proyeksi PTK yang akan menjadi target pelatihan pada periode Renstra 2025-2029 sejumlah 11.845 orang. Target ini ditetapkan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pandukung (SDM, anggaran dan sarana prasarana), serta selaras dengan Program Prioritas Nasional, Program Prioritas Kemendikdasmen dan program unggulan Ditjen Diksi PKPLK.

Grafik 1.3.
Target, Capaian dan Proyeksi Peningkatan Kompetensi PTK Bidang Pertanian



Sumber Data: Dapodik per. Desember 2024, Renstra Ditjen Diksi PKPLK, 2025

Tabel 1.3.
Jumlah PTK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Bidang Pertanian Periode 2021-2024

Indikator Kinerja Kegiatan (Pendukung SK 1)	BBPPMPV Pertanian				JUMLAH Capaian 2021-2024
	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan Pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan Dunia kerja	1.906	1.872	2.563	2.698	9.039

Sumber: LAKIN BBPPMPV Pertanian, 2024

Gambar 1.2.
Peta Sebaran SMK Bidang Agribisnis dan Agriteknologi Seluruh Indonesia



Sumber: https://sites.google.com/view/e-ppidbbppmpvpertanian

Gambar 1.3.
Peta Sebaran Jumlah SMK PK Binaan BBPPMPV Pertanian (Seluruh Bidang Keahlian) Bidang Kurikulum dan Manajerial



b.2. Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan. Lingkup satuan pendidikan vokasi yang akan dipetakan mutunya oleh BBPPMPV Pertanian adalah SMK.

Mutu Pendidikan Vokasi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan acuan Standar Nasional Pendidikan (PP Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahannya) serta Kepmendikbudristek Nomor 165/M/2021 tentang Program SMK Pusat Keunggulan, dan peraturan serta kebijakan terkait (Link and Match/Keterlibatan Dunia kerja di segala aspek penyelenggaraan pendidikan vokasi 8+i).

Pemetaan mutu satuan pendidikan vokasi merupakan rangkaian mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan pada Satuan Pendidikan Vokasi. Tujuan pemetaan mutu satuan pendidikan vokasi adalah untuk memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pada satuan pendidikan vokasi, serta bersama-sama memiliki budaya mutu.

Mengacu surat dari Sekretaris Dirjen Pendidikan Vokasi tanggal 31 Maret 2022, nomor 2340/D1/PR.01.04/2022 tentang Pembagian Wilayah Sasaran Program maka wilayah kerja BBPPMPV Pertanian untuk pembinaan SMK (terkait Sosialisasi dan Pendampingan Program Perencanaan Berbasis Data dan Rapor Pendidikan) adalah pada 4 provinsi yaitu Banten, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung dan Papua. Pada tahun 2023 Provinsi Papua mengalami pemekaran, menjadi 4 Provinsi baru yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Sehubungan adanya peluncuran Rapor Pendidikan Kemendikbudristek pada bulan Mei 2023, maka diperlukan penguatan kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kemendikbudristek terkait Perencanaan Berbasis Data (PBD) dan platform Rapor Pendidikan tahun 2023. Selanjutnya, merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah Kejuruan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek Nomor 4322/D/ PR.07.04/2022 tentang Optimalisasi Anggaran Pendampingan Satuan Pendidikan Vokasi untuk Mendukung IKM, PBD dan Tracer Study, maka BBPPMPV Pertanian berupaya menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung percepatan program tersebut, diantaranya adalah menyiapkan Pendamping

Satuan Pendidikan Vokasi Tahun 2024 melalui sinergisitas dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Jenjang SMK.

Hingga akhir periode Renstra, BBPPMPV Pertanian telah melakukan pendampingan dalam rangka peningkatan mutu satuan pendidikan, sebagai berikut:

Tabel 1.4.
Pendampingan Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan Tahun 2021 hingga 2024

TAHUN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
2021	Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	102	147	**144,12**
2022	Jumlah Satuan Pendidikan Vokasi dengan	319	991	**310,66**
2023	Mutu yang Terpetakan	319	425	**133,23**
2024		555	767	**138,20**

Sumber: LAKIN BBPPMPV Pertanian, 2024

b.3. Pengembangan Model /Inovasi Pembelajaran

Pengembangan model pendidikan vokasi adalah proses penelitian terapan yang merancang tipe, desain, bentuk deskripsi, sistem kegiatan, yang diproses dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah dan hasilnya dapat mewakili kondisi nyata yang diharapkan oleh kelompok sasaran dan mampu memecahkan masalah bidang pendidikan vokasi. Untuk memperoleh hasil seperti itu, model program atau pembelajaran divalidasi oleh ahli dan praktisi dan diujicobakan sehingga model yang dihasilkan efektif, efisien, praktis dan menarik dalam memecahkan masalah atau dalam memenuhi kebutuhan Dunia kerja. Model yang dikembangkan dapat berbentuk model adaptasi dan model baru. Model adaptasi merupakan pengembangan model yang telah ada. Model baru merupakan model yang dikembangkan sendiri oleh pengembang. Kriteria model/inovasi pembelajaran yang dimaksud antara lain:

- Memperkuat Implementasi Link and Match Pendidikan Vokasi;
- Memberikan solusi kemitraan dan penyelarasan Satuan Pendidikan Vokasi (SMK/PTV/LKP) dengan mitra Dunia kerja;
- Memiliki dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan vokasi; dan
- Memiliki kemudahaan direplikasi oleh Satuan Pendidikan Vokasi.

Tabel 1.5.
Model/ Inovasi Pembelajaran yang dikembangkan di Satuan Pendidikan Berbasis Dunia Kerja, Periode 2021 hingga 2024

TAHUN	KEGIATAN PENDUKUNG IKK 1.3.	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
2021	Pengembangan Tefa	5	11	220
	Pengembangan Produk Kreatif	15	15	100
	Jumlah 2021	*20*	*26*	*130*
2022	Inovasi Model Pembelajaran Vokasi Mengacu pada Dunia Kerja	2	4	200
2023		2	4	200
2024		5	5	120
	JUMLAH 2021 s.d. 2024	***29***	***39***	***134,48***

Sumber: LAKIN BBPPMPV Pertanian, 2024

Kerjasama/Kemitraan dengan dunia kerja merupakan pendukung tercapainya berbagai program Peningkatan kompetensi PTK, Penningkatan Mutu Satuan pendidikan maupun Pengembangan Inovasi Pembelajaran. Khususnya yang berkaitan dengan program pengembangan model pembelajaran vokasi yang mengacu pada kebutuhan Dunia kerja, diharapkan dengan adanya peningkatan dalam jumlah jalinan kemitraan dengan dunia kerja, akan semakin memperdalam keselarasan kurikulum dan kompetensi lulusan SMK yang diimplementasikan melalui pengembangan model pembelajaran baik di BBPPMPV Pertanian maupun di tingkat satuan Pendidikan.

Tabel 1.6. Jumlah Kesepakatan Kerja Sama antara BBPPMPV Pertanian dengan Mitra Dunia Kerja, periode 2021-2024

TAHUN	KEGIATAN PENDUKUNG IKK 1.3.	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
2021	*Link and Match* BBPPMPV dengan DUDI	45	41	91,11
2022	Satuan Pendidikan Vokasi yang Bermitra dengan Dunia kerja	7	9	128,57
2023		11	28	254,54
2024		14	20	142,86
	JUMLAH	**77**	**98**	**127,27**

Sumber: LAKIN BBPPMPV Pertanian, 2024

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada empat tahun terakhir telah disepakati 98 Naskah Kesepakatan Kerja Sama atau kemitraan antara BBPPMPV Pertanian dengan dunia kerja yang mendukung peningkatan mutu Pendidikan dan pelatihan PTK Vokasi.



Penandatanganan Naskah Kerja Sama antara BBPPMPV Pertanian dengan Dunia Kerja (Mitra Industri)

c. Isu Strategis

Merujuk pada Renstra Ditjen Diksi PKPLK tahun 2024 – 2024, maka isu-isu strategis yang perlu perhatian adalah:

Isu Strategis	Peran Strategis
Total PTK SMK dibawah Ditjen Diksi PKPLK berjumlah 337.313 orang. Dari jumlah tersebutu, PTK yang telah mendapatkakn pelatihan pada periode 2020-2024 sebanyak 59.679 orang atau sekitar 17,7%. Artinya sejumlah 277.634 PTK (82,3%) belum terjangkau pelatihan pada periode tersebut.	BBPPMPV Pertanian memiliki peran strategis dalam melakukan akselerasi peningkatan kompetensi PTK SMK, khususnya bidang Aribisnis dan Agriteknologi. Diharapkan melalui peningkatan kompetensi PTK, berdampak kepada peningkatan mutu SMK dan kompetensi lulusan untuk memenuhi kebutuhan Dunia Kerja.
Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja 2025-2029, bahwa proyeksi disribusi kesempatan kerja menurut katagori level skill 2024 dan 2029, terdapat pergeseran permintaan (Dunia Kerja) dari level administratif/klerikal (level 2) dan operator/teknis (level 3) ke kombinasi pekerjaan berjeahlian tinggi (Level 1). Hal ini menyebabkan risiko surplus tenaga kerja menengah dan ketidakcocokan keterampilan yang dimiliki lulusan SMK dengan kebutuhan Dunia Kerja**.**	BBPPMPV Pertanian melaksanakan program Pelatihan / Peningkatan kompetensi berbasis industri dengan membekali kembali serta meningkatkan kompetensi Guru Kejuruan, disempurnakan dengan pengalaman belajar di Dunia Kerja melalui program magang industri, sehingga Guru memahami kebutuhan kompetensi lullusan SMK saat ini.
Diperlukan adanya kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan vokasi, melalui aktivitas pengembangan model dan inovasi pembelajaran berbasis industri yang diharapkan dapat menghasilkan model-model inovasi pembelajaran	Pengembangan inovasi pembelajaran melalui aktivitas penelitian dan pengembangan dilakukan oleh BBPPMPV Pertanian pada bidang Agribisnis dan Agroteknologi. BBPPMPV Pertanian juga perlu melaksanakan pengembangan inovasi pembelajaran berbasis *link and match (centre of innovation)*. Hasil inovasi atau pengembangan model pembelajaran diharapkan meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pelatihan vokasi dengan metode *problem-based learning* dan *project-based learning* agar peserta didik dapat bekal yang cukup berupa *technical skills dan soft skills* sesuai dengan standar dunia industri.
Pengembangan mutu pendidikan vokasi berbasis kompetensi harus *link and match* dengan industri guna membangun manusia yang terampil, berdaya saing dan siap bekerja dibidang industri.	BBPPMPV Pertanian menjadi penghubung jalinan Kerjasama antara industri dengan satuan Pendidikan dalam hal penyelarasan kurikulum, tempat magang Guru dan Siswa, sumber Guru Tamu, dan penyerapan lulusan pada dunia kerja.

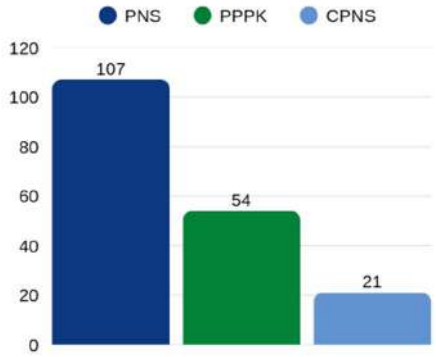
Isu Strategis	Peran Strategis
Dalam mendukung sistem penjaminan mutu pendidikan vokasi yang komprehensif, berbasis data, dinamis, dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan, diperlukan adanya pengembangan aplikasi/portal penjaminan mutu pendidikan vokasi yang memuat data mutu seluruh SMK dan LKP di wilayah binaan. Pemanfaatan pengelolaan data dan informasi ini diharapkan juga membuka kesempatan pada SMK dan LKP untuk dapat mengakses beragam aplikasi tersebut, sehingga portal penjaminan mutu ini juga sekaligus menjadi media *sharing best practice* dalam pendidikan vokasi.	BBPPMPV Pertanian perlu mengaktifkan penggunaan website sebagai representasi lembaga secara digital dan menggunakan media sosial sebagai media komunikasi dan sumber informasi Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

a. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sepanjang periode Renstra 2025 – 2029, BBPPMPV Pertanian didukung oleh tim sumber daya manusia yang handal, dengan jumlah keseluruhan Aparatur Sipil Negara (PNS, CPNS dan PPPK) sebagai berikut.



Grafik 1.4.
Jumlah ASN BBPPMPV Pertanian tahun 2025

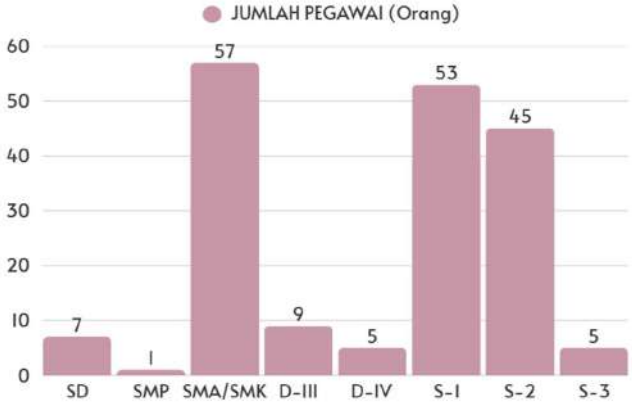
Komposisi ASN (182 orang) pada tahun 2025 digambarkan dalam beberapa grafik berikut ini:

1. Berdasarkan Jabatan

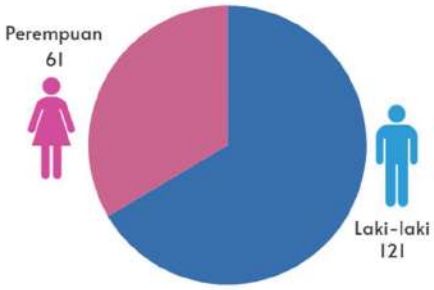


Sumber: BBPPMPV Pertanian, 2025

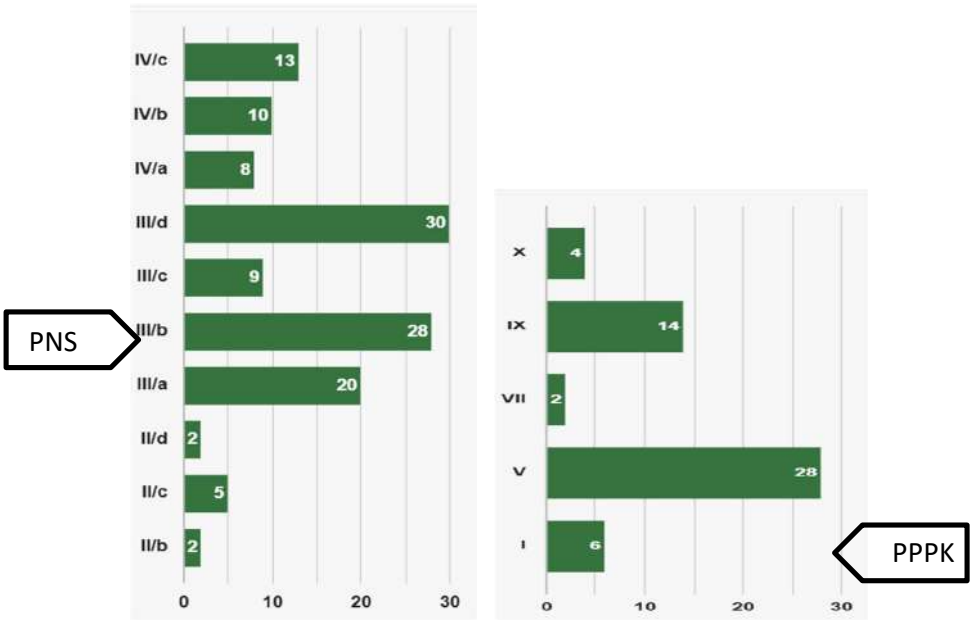
2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan



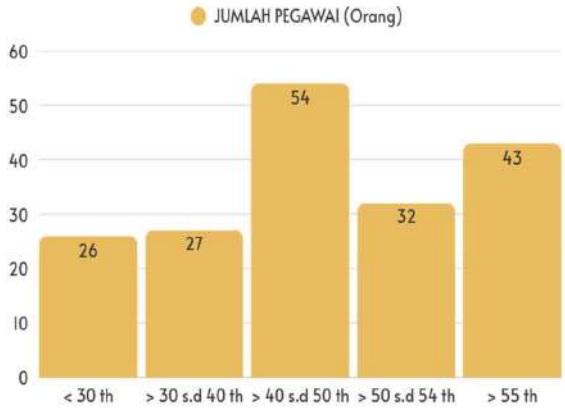
3. Berdasarkan Gender



4. Berdasarkan Golongan Kepegawaian



5. Berdasarkan Rentang Usia



Disamping Sumber Daya Manusia, BBPPMPV Pertanian juga memiliki sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain:

- Ruang teori atau tutorial pelatihan/ peningkatan kompetensi, yang tersebar di Unit Pelaksana Pelatihan maupun di area ruang teori sebanyak 14 kelas, dengan fasilitas papan digital interaktif, system tata suara, dan koneksi internet yang memadai, dengan kelengkapan:



  - Ruang Pengujian dan Pengolahan serta Laboratorium Kimia Industri, penunjang bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP)
  - Green House, Lahan Praktik Pertanian Perkebunan dan Laboratorium Kultur Jaringan, penunjang bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH),
  - Wahana dan peralatan praktek berupa Kolam Ikan, Bioflok, Kolam Hatchery, penunjang bidang Agribisnis Perikanan,
  - Wahana dan peralatan praktek berupa Kandang Ayam, Kandang Domba, Kandang Sapi, Kandang Ayam Puyuh penunjang bidang Agribisnis Peternakan,
  - Laboratorium Fisika, Laboratorium Kimia, Laboratorium Mekanisasi, Laboratorium Rancang Bangun Pertanian, penunjang bidang Sains Terapan, Otomasi Pertanian dan Pengajaran Umum (STOPPU).



- Perpustakaan sebagai tempat dan sumber belajar untuk mendukung kegiatan pengembangan dan penjaminan mutu Pendidikan yang telah dilengkapi berbagai sumber belajar berupa CD pembelajaran, koleksi buku digital dan buku bacaan lainnya,
- Laboratorium Komputer sebanyak 2 unit dengan kapasitas masing-masing 24 unit komputer serta Ruang pengembangan konten pembelajaran (siniar),
- Asrama/Mess/Resort yang digunakan untuk penginapan para peserta diklat
- Sarana Olahraga berupa lapangan futsal, Lapangan Tenis, Tenis Meja, Tempat *Gym*, Lapangan Bulutangkis, Kolam Renang
- Tempat Ibadah berupa Masjid dan Mushola



Seluruh sarana dan prasarana yang ada dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas fungsi lembaga yaitu peningkatan kompetensi PTK bidang Pertanian, penjaminan mutu serta tempat pertemuan Satuan Pendidikan dan Dunia Kerja untuk menjalin kerja sama. Wilayah pembinaan BBPPMPV Pertanian meliputi seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang Agribisnis dan Agroteknologi, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) khususnya bidang Pertanian yang berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal yang berpengaruh positif merupakan "peluang" bagi BBPPMPV Pertanian dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai Visinya. Peluang yang dimaksud adalah:

- Komitmen pemerintah untuk memenuhi anggaran pendidikan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 13/PUU-VI/2008 sesuai dengan amandemen ke 4 UUD 1945 pasal 31 ayat 4 yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
- Kuatnya dukungan lembaga legislatif dan pemerintah terhadap pembangunan pendidikan, khususnya peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru;
- Belum semua satuan pendidikan memiliki Pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai seperti Guru, Dosen, Instruktur, teknisi, pustakawan, tenaga laboratorium, Kepala sekolah dan pengawas yang berlisensi;
- Meningkatnya tuntutan sertifikasi kompetensi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja atau pihak ketiga;
- Besarnya komitmen masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan pendidikan antara lain melalui *Corporate Social Responsibility (CSR).*
- Kemajuan Teknologi digital dan kecerdasan artifisial membuka peluang terhadap pengayaan materi ajar menjangkau daerah-daerah yang terpencil sehingga dapat mendukung efisiensi pengelolaan e-administrasi pendidikan.

Kondisi eksternal yang dapat menghambat yang dapat dikategorikan sebagai "ancaman" bagi BBPPMPV Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah:

- Kenaikan anggaran pendidikan melalui APBN sebesar 20% tidak berbanding lurus dengan peningkatan kompetensi serta Kinerja Guru dan tenaga Kependidikan. Kenaikan anggaran pendidikan lebih banyak untuk keperluan pemenuhan tunjangan profesi Guru, Kepala sekolah dan Pengawas. Namun

demikian tunjangan profesi tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja Guru, Kepala sekolah dan Pengawas;

- Otonomi yang luas kepada daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diatur kembali dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pendidikan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat kemudian dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kondisi ini berdampak kepada adanya kewenangan Pemerintah daerah untuk mengatur sendiri bagaimana meningkatkan mutu PTK-nya, sementara itu koordinasi dan sinkronisasi program dengan pemerintah daerah memerlukan biaya dan waktu serta tantangan tersendiri.
- Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, menuntut seluruh instansi pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran dalam seluruh kegiatannya. Hal ini direspon dengan menyusun berbagai alternatif strategi pelaksanaan program dan kegiatan supaya tetap implementatif dan mencapai target kinerja yang bermutu.

1.2.2. Permasalahan

Besarnya target sasaran program serta luasnya cakupan tanggungjawab yang diemban oleh BBPPMPV Pertanian merupakan tantangan yang harus dihadapi. Sehingga dengan segenap potensi, kemampuan dan fasilitas pendukungnya semua pihak secara professional dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing. Daya dukung anggaran menjadi hal yang sangat penting jika melihat beban kerja serta cakupan wilayah garapan. Beban program serta target okupansi tersebut belum selaras dengan alokasi anggaran yang diberikan.

Dilain pihak akibat dari posisi BBPPMPV Pertanian sebagai salah satu UPT Kemendikdasmen dibawah Ditjen Diksi PKPLK, menjadikan unit utama diatasnya bisa secara langsung dapat mengintervensi proses eksekusi program. Tugas pokok dan fungsi yang bersifat *mandatory* dalam kaitannya dengan instruksi penuntasan capaian program yang dikeluarkan oleh Ditjen Diksi PKPLK harus dapat dituntaskan secara paralel dengan program kerja yang dimiliki oleh BBPPMPV Pertanian. Maka

perlu strategi dan pengelolaan cerdas dalam mengawal dan memastikan semuanya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai harapan. Meskipun kadang-kadang hal tersebut dapat menjadi beban kerja tambahan (*overloaded work*) yang cenderung dapat memberatkan.

a. Analisis Masalah

Berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal BBPPMPV Pertanian dapat diidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi agar dapat segera diantisipasi langkah yang tepat dalam melaksanakan Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan meliputi Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman, sebagaimana tercantum dalam tabel analisis dibawah ini.

Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
▪ Lahan pengembangan pendidikan dan pelatihan pertanian yang cukup luas. ▪ Sarana dan prasarana diklat yang memadai. ▪ Kompetensi fasilitator diklat (widyaiswara, PTP, PLP, dan fungsional lainnya) yang sangat berpengalaman. ▪ Asesor kompetensi keahlian yang berlisensi dan diakui secara Nasional. ▪ Budaya dan lisensi sistem manajemen mutu terakreditasi. ▪ Kesiapan fasilitasi peningkatan kompetensi menuju proses *hybrid learning and training*. ▪ Penerimaan yang sangat baik dari keluarga besar SMK	▪ Regenerasi posisi jabatan fungsional yang bertugas sebagai fasilitator diklat (widyaiswara, PTP) yang sangat lambat. ▪ Jejaring kemitraan bidang pertanian yang tidak banyak. ▪ Literasi digital (teknologi) yang tidak merata. ▪ Sistem inventarisasi dan tabulasi data yang masih harus diperbaiki. ▪ Alokasi jumlah partisipan diklat yang sangat terbatas. ▪ Alokasi anggaran yang masih kecil ▪ Fluktuasi dari keberadaan unit percontohan produksi sebagai penunjang paket pelatihan sesuai dengan	▪ Jumlah SMK bidang Pertanian seluruh Indonesia sebanyak 2.017 ▪ Struktur kelmbagaan baru yang masih fresh. ▪ Revitalisasi pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan vokasi pertanian. ▪ Rekonstruksi dan perancangan desain kurikulum diklat yang sangat dinamis. ▪ Domain garapan yang lebih luas teridiri dari SMK, PT Vokasi, dan LKP. ▪ Digitaliasi layanan Diklat. ▪ Menciptakan tren pertanian yang modern dan menyenangkan., melalui model *smart integrated farming*.	▪ Pengurangan SDM fasiltator diklat (widyaiswara, PTP, teknisi, laboran, dan fungsional lainnya) yang akan pensiun massal. ▪ Pendidikan Vokasi bidang pertanian dan teknik kimia yang didampingi (SMK-PTV-LKP) belum memenuhi standar.Tingkat pengangguran terdidik dihasilkan oleh pendidikan menengah kejuruan (SMK). Berdasarkan data BPS. ▪ Kesenjangan kompetensi (*competency gap*) yang masih terjadi di lingkungan internal.

Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
Pertanian dan Teknik Kimia yang kembali di bawah payung pembinaan oleh BBPPMPV Pertanian. ▪ Memiliki peta jalan pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi bidang Pertanian dan teknik Kimia yang terukur. ▪ Komitmen pimpinan dan seluruh warga BBPPMPV Pertanian dalam upaya memajukan layanan fasilitasi peingkatan kompetensi dan pendampingan pengembangan pendidikan vokasi pertanian.	kompetensi keahlian yang ada. ▪ Responsivitas institusi terhadap kebutuhan pasar industri, dunia usaha dan dunia kerja yang masih kurang kuat. ▪ Penggunaan KKNI sebagai rujukan dalam menyusun kurikulum diklat yang masih termarjinalkan.	▪ Desain pengembangan diklat berbasis keterampilan abad ke 21. ▪ *Upgrade* sarana dan prasarana pendukung fasilitasi peningkatan kompetensi PTK bidang pertanian dan Teaching Factory. ▪ *Link and match* antara BBPPMPV Pertanian dengan SMK dan DUNIA KERJA. ▪ Kolaborasi Riset terapan antara BBPPMPV P – SMK – DUNIA KERJA. ▪ Pengembangan model *teaching/learning factory* di pendidikan vokasi bidang pertanian. ▪ Menjadi *Center of Excellent* bagi pendidikan vokasi pertanian. ▪ Inovasi bidang pertanian	

Dari analisis di atas, beberapa permasalahan yang sekaligus juga merupakan tantangan (*challenges*) dapat digambarkan sebagai potensi di masa depan adalah :

1) Peningkatan SDM Widyaiswara dan teknisi baru yang profesional dan menguasai teknologi pertanian modern.
2) Pengakuan kompetensi keahlian Widyaiswara melalui sertifikasi oleh Dunia Kerja.
3) Revitalisasi sarana dan prasarana diklat.
4) Mensinkronisasi Renstra Diksi dengan Tusi BBPPMPV Pertanian.
5) Paradigma fasilitasi peningkatan kompetensi yang mengarah ke *blended learning* atau *hybrid learning*.
6) Implementasi model pembelajaran Keterampilan Abad ke 21 (*21st Century Skills*)
7) Merekonstruksi proses Pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based learning*)
8) Meningkatkan kompetensi Literasi TIK SDM;
9) Membangun komunitas guru bidang keahlian produktif di setiap daerah.
10) Membangun komunitas guru adaptif-normatif terapan SMK pertanian disetiap daerah.
11) Membantu Ditjen Vokasi PKPLK dalam menghasilkan (memproduksi) dan mendistribusikan Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas.
12) Meningkatkan peran Dinas Pendidikan provinsi dalam peningkatan kompetensi Guru.
13) Meningkatkan peran BBPPMPV Pertanian dalam pembinaan Guru Pertanian.
14) Mengadaptasi kecakapan global melalui pengembangan platform layanan berbasis Digital society 5.0.
15) Penyelarasan SMK dengan dunia kerja.
16) Peran pembinaan manajemen sekolah oleh BBPPMPV Pertanian kepada SMK Pertanian.
17) Keterlibatan praktisi DUNIA KERJA dalam memberikan pengajaran di SMK.
18) Sinkronisasi kurikulum Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi Pertanian antara BBPPMPV Pertanian dengan dunia kerja.
19) Pemerataan akses bagi SMK swasta dan SMK Negeri.
20) Kolaborasi Riset terapan antara BBPPMPV Pertanian – SMK – dunia kerja.
21) Penyelarasan pembelajaran dalam pencapaian kompetensi *hard skill* dan *soft skill* bidang keahlian pertanian.
22) Menciptakan tren pendidikan pertanian modern dan menyenangkan.
23) Melahirkan Enterpreur muda bidang pertanian.

24) Integrasi kurikulum adaptif-normatif-produktif kedalam proses pembelajaran.
25) Pengembangan model *teaching/learning factory* di pendidikan vokasi bidang pertanian.
26) Pengadaan kekurangan SDM Widyaiswara dan teknisi baru
27) Masih terdapat SMK Pertanian berdasarkan penilaian belum sesuai dengan SNP SMK.
28) Pemerataan kompetensi guru, akses pendidikan, akses informasi termasuk internet dan teknologi pertanian pada SMK pertanian yang umumnya ada di wilayah pedesaan.
29) Profil dan promosi SMK pertanian yang umumnya ada di wilayah pedesaan.
30) Pengembangan dan implementasi pembelajaran dalam pencapaian kompetensi *hard skill* dan *soft skill* yang otonom, terintegrasi, suplemen dan kolaborasi secara konsisten, dan berkelanjutan.
31) Lulusan SMK belum banyak terserap bekerja di DUNIA KERJA yang sesuai bidangnya.
32) Lemahnya kemampuan berwirausaha, terutama wirausaha bidang pertanian.
33) Ada perbedaan yang signifikan antara Budaya Kerja di Sekolah dan DUNIA KERJA.
34) Ada pergeseran teknik pembelajaran konvensional ke arah digital (virtual).
35) Ada sebagian daerah yang masih tergolong daerah 3T.
36) Lemahnya sistem tabulasi dan invetarisasi data.
37) Kemampuan yang belum merata dalam merespons pembelajaran keterampilan Abad ke 21.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanana Khusus (Ditjen Diksi dan PKPLK) tahun 2025 – 2029, visi BBPPMPV Pertanian yaitu

"Meningkatnya Mutu Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pertanian, serta Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan, dalam rangka mendukung Visi Kemendikdasmen yaitu terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045."

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut, BBPPMPV Pertanian mengusung komitmen Kemendikdasmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH), serta mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan pendidikan vokasi bidang Pertanian di Indonesia.

2.2. Misi

Dalam menjalankan mandat dari Ditjen Diksi PKPLK, maka BBPPMPV Pertanian berperan langsung dalam mendukung misi satu dan misi tiga Kemendikdasmen.

Misi 1 Kemendikdasmen:
Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran.

BBPPMPV Pertanian berperan dalam memperluas akses peningkatan mutu layanan pelatihan PTK bidang pertanian dan meningkatkan mutu satuan pendidikan yang didukung sistem pembelajaran berkualitas berbasis teknologi serta sarana dan prasarana memadai.

Misi 3 Kemendikdasmen

Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

BBPPMPV Pertanian berperan menguatkan kemitraan dan kolaborasi dengan dunia kerja dan seluruh seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan dan penyelarasan kurikulum, pemagangan Guru dan Siswa serta pengembangan model/inovasi pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan bidang pertanian.

2.3. Tujuan

Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 – 2029, terdapat rincian tujuan Kemendikdasmen yang menjadi jangkar perencanaan serta dasar penetapan indikator kinerja (outcome–output), baseline dan target tahunan, penugasan unit pelaksana, hingga penganggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, capaian tujuan dapat dimonitor melalui sistem pelaporan yang konsisten, diaudit secara akuntabel, dan digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan kebijakan. Berikut merupakan tujuan Kemendikdasmen yang didukung oleh BBPPMPV Pertanian.

Tabel 2.1.
Tujuan Strategis Kemendikdasmen yang terkait dengan Tugas BBPPMPV Pertanian Tahun 2025 – 2029

TUJUAN KEMENDIKDASMEN (yang didukung oleh Ditjen Diksi PKPLK dan BBPPMPV Pertanian)	INDIKATOR TUJUAN KEMENDIKDASMEN	TUJUAN BBPPMPV Pertanian
T4. Meningkatnya mutu layanan dan relevansi pendidikan vokasi	IT 4.1. Persentase angkatan kerja lulusan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun	1. Meningkatnya mutu Pelatihan PTK Bidang Pertanian, Guru sebagai Pendamping SMK dan Guru sebagai Kepala SMK

TUJUAN KEMENDIKDASMEN (yang didukung oleh Ditjen Diksi PKPLK dan BBPPMPV Pertanian)	INDIKATOR TUJUAN KEMENDIKDASMEN	TUJUAN BBPPMPV Pertanian
		2. Meningkatnya mutu Satuan Pendidikan
T5. Penguatan sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.	IT 5.1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	Meningkatnya kualitas tata kelola BBPPMPV Pertanian yang berintegritas dan akuntabel.

2.4. Sasaran Kinerja

Selanjutnya, untuk mengetahui ketercapaian tujuan stategis, maka perlu dijabarkan ke dalam sasaran strategis sehingga tujuan strategis lebih terukur. Sasaran Strategis ini menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra. BBPPMPV Pertanian telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sepanjang periode Renstra 2025 - 2029 dan akan menopang ketercapaian sasaran strategis Ditjen Pendidikan Vokasi dan PKPLK. Untuk itu, penyusunan sasaran strategis BBPPMPV Pertanian harus berpedoman pada sasaran strategis Ditjen Pendidikan Vokasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi BBPPMPV.

Tabel 2.2.
Indikasi Risiko

SASARAN STRATEGIS BBPPMPV Pertanian	INDIKASI RISIKO
Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	1. Terbatasnya wilayah kolaborasi dan kemitraan antara BBPPMPV Pertanian dengan industri (terpusat di Pulau Jawa) berdampak pada terbatasnya program magang yang relevan dan berkualitas; 2. Kemitraan industri swasta tidak berjalan optimal dalam penyelarasan kurikulum dan pembelajaran, berdampak pada kurikulum satuan pendidikan tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja; 3. Sertifikasi kompetensi belum diakui oleh industri atau tidak terstandar sesuai kebutuhan industri, berdampak pada keterbatasan pengakuan kompetensi; 4. Ketersediaan sarana pelatihan PTK kurang memadai, beberapa alat praktik belum sesuai dengan kebutuhan/standar industri, dan perkembangan teknologi, berdampak pada capaian kompetensi tidak relevan dengan teknologi kekinian; 5. Keterbatasan jumlah instruktur bidang pertanian dan guru kejuruan bidang tertentu, berdampak pada manfaat peningkatan kompetensi tidak tepat sasaran;

SASARAN STRATEGIS BBPPMPV Pertanian	INDIKASI RISIKO
	6. Kurangnya komitmen daerah dalam pengembangan pendidikan vokasi sesuai dengan potensi dan arah pengembangan pembangunan daerah bidang pertanian, berdampak pada kurang berkembangnya pendidikan vokasi berbasis potensi daerah; 7. Data *tracer study* belum secara optimal dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pembelajaran, berdampak pada perencanaan pengembangan pendidikan vokasi yang kurang tepat.
Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian	1. Program peningkatan kualitas tata kelola tidak dilaksanaan sesuai perencanaan, maka pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran berpotensi tidak efisien, menyebabkan pelayanan BBPPMPV Pertanian menurun dan meghambat pencapaian tujuan strategis 2. Program penguatan akuntabilitas kinerja tidak terlaksana berdasarkan rekomendasi dari pihak eksternal dan internal, dan tidak berbasis data yang dapat berdampak pada penurunan predikat akuntabilita instansi; 3. Hasil rekomendasi monitoring dan evaluasi kinerja dari pihak internal maupun eksternal tidak dimanfaatkan oleh lembaga untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan dan penyusunan program/kebijakan pada tahun berikutnya; 4. Kebijakan ditetapkan tidak berdasarkan data aktual, tidak melibatkan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya, dan advokasi kebijakan tidak opi 5. Objektivitas pelaksanaan pengawasan internal tidak terjadi karena ada kepentingan beberapa pihak.

Secara rinci, perwujudan tujuan strategis yang dijabarkan kedalam sasaran kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan diatas, ditetapkan target capaiannya selama 5 tahun sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan BBPPMPV Pertanian 2025-2029

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	2.862 Orang
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	8.650 Orang
	Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	333 Orang
	Sarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	5 Paket

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Jumlah satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya	Prasarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	5 Unit
	Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	2.488 Lembaga
Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi	Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	22 Rekomendasi Kebijakan
	Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	70 Kesepakatan

Tabel 2.4.
Target Kinerja Sasaran Strategis BBPPMPV Pertanian
Periode Renstra 2025 – 2029

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SK Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi						
IKK Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja						
Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	318	636	636	636	636
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	Orang	766	1,971	1,971	1,971	1,971
Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	Orang	37	74	74	74	74
IKK Jumlah satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya						
Sarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	Paket	1	1	1	1	1
Prasarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	Unit	1	1	1	1	1
Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	Lembaga	288	393	498	602	707
IKK Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi						
Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	Rekomendasi Kebijakan	2	2	5	6	7
Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	Kesepa-katan	14	14	14	14	14

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikdasmen

Arah kebijakan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjabaran Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikdasmen selaras dengan Prioritas Nasional butir 4 (empat) dan 8 (delapan) berikut:

Prioritas Nasional 4 :

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Prioritas Nasional 8:

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Tabel 3.1.
Sasaran Strategis Kemendikdasmen dalam mendukung
Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Prioritas Nasional 4

No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kemendikdasmen
Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, & Penyandang Disabilitas		
4	Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi

Dengan mengacu pada arah kebijakan Kemendikdasmen di atas, Ditjen Diksi PKPLK merumuskan Arah dan Strategi, serta Sasaran Kegiatan yang diformulasikan berdasarkan dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 4, serta Sasaran Strategis Kementerian sebagai berikut:

Tabel 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi, serta Sasaran Kegiatan Ditjen Diksi PKPLK

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian	Sasaran Kegiatan Ditjen Diksi PKPLK
Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, & Penyandang Disabilitas			
1	Penguatan sistem tata kelola pendidikan	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian	Sasaran Kegiatan Ditjen Diksi PKPLK
2	Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi	Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BBPPMPV Pertanian

Mengacu kepada Renstra Ditjen Diksi PKPLK 2025-2029 bahwa arah kebijakan dan strategi Ditjen Diksi PKPLK yang sesuai denga tusi BBPPMPV Pertanian adalah:

1. **Peningkatan Peran dan Kerja Sama Industri dalam Peningkatan Kompetensi PTK Bidang Pertanian**

   Strategi:

   a. Pengembangan kerjasama kemitraan dengan Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota, Dunia Kerja, dan instansi lain dalam peningkatan kompetensi PTK bidang pertanian;
   b. Peningkatan peran pemerintah daerah untuk pengembangan PTK Bidang pertanian berbasis wilayah;
   c. Pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja;
   d. Sharing pembiayaan oleh industri pada program magang produktif SMK, mahasiswa vokasi dan PTK;
   e. Subsidi dana CSR perusahaan kepada industri kecil menengah yang memerlukan tenaga pemagangan dari peserta kursus atau SMK.

2. **Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pangajaran dan Pembelajaran pada Pelatihan Peningkatan Kompetensi PTK Bidang Pertanian**

   Strategi:

   a. Peningkatan kerja sama, keterlibatan, dan partisipasi industri/swasta untuk penyelarasan kurikulum dan model pembelajaran dengan standar industri, serta peningkatan penyediaan pemagangan dan praktik kerja;

b. Pengembangan model pembelajaran berkarakter/berstandar industri, seperti teaching factory/industry, dan secara selektif mengembangkan unit usaha pada satuan pendidikan yang memiliki kesiapan;
c. Mendorong pembelajaran mendalam yang berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta keterampilan praktis di bidang kejuruan.
d. Pengembangan Pembelajaran tentang Koding dan Kecerdasan Artifisial untuk memastikan keterampilan digital peserta didik dan tenaga pendidik yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
e. Penguatan fasilitasi dan sistem sertifikasi kompetensi, terutama dengan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi.
f. Penguatan kualitas pembelajaran yang dapat mendorong pada penguasaan kewirausahaan, soft skills dan penanaman karakter kerja, dan kesiapan bekerja.
g. Pengembangan Learning Management System yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen fasilitasi pelatihan (SIMFAL).
h. Perluasan penerapan teaching factory yang berkualitas bekerjasama dengan dunia kerja.
i. Revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktik sesuai dengan standar.
j. Peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri;

3. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi Bidang Pertanian

Strategi:

a. Penyelenggaraan program *upskilling* dan *reskilling* berbasis dunia kerja untuk Pendidik dan Tenaga Pendidik vokasi bidang pertanian agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan metodologi pengajaran terbaru.;
b. Magang industri bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan vokasi sesuai kompetensi;
c. Peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi;
d. Peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri;

4. Peningkatan pelaksanaan satuan pendidikan yang terpetakan mutunya

Strategi:

a. Pemetaan mutu pendidikan vokasi;
b. Supervisi dan pendampingan pendidikan vokasi;
c. Pelaksanaan Evaluasi program penjaminan mutu vokasi.

5. Pengembangan Model Pembelajaran Vokasi

Strategi:

a. Pengembangan model pembelajaran berstandar industri, seperti teaching factory dan pengembangan unit usaha di SMK, Pendampingan Rintisan Kewirausahaan bersama industri di LKP
b. Pengembangan dan inovasi model pembelajaran vokasi;
c. Pengembangan Sekolah Model;
d. Pemberian bantuan dalam pengembangan model dan inovasi pada satuan pendidikan vokasi;

6. Reformasi Birokrasi Internal

a. Penataan organisasi melalui penyusunan SOTK Internal, rincian tugas, mekanisme/prosedur kerja dan pemberdayaan unit kerja di lingkup BBPPMPV Pertanian
b. Perubahan perilaku seluruh komponen di BBPPMPV Pertanian dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
c. Pengembangan perangkat/penunjang pelaksanaan kegiatan
d. Pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM BBPPMPV Pertanian.
e. Penguatan perencanaan kebutuhan dan usul rekrutmen, pemetaan dan pengembangan, pembinaan, dan pemberdayaan SDM;
f. Penguatan perencanaan, pengelolaan, pengendalian program/kegiatan dan keuangan BBPPMPV Pertanian.
g. Optimalisasi Fungsi Satuan Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
h. Revitalisasi sarana dan prasarana BBPPMPV Pertanian dilakukan melalui program perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan sarana dan prasarana dan pemanfaatan dan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, beberapa regulasi yang diprioritaskan untuk dilakukan penyesuaian, Adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Kerangkka Regulasi Ditjen Diksi PKPLK 2025-2029

ARAH KERANGKA REGULASI DAN ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI YANG BERLAKU, KAJIAN DAN PENELITIAN	TARGET PENYELESAIAN	UNIT ESELON 1 yang terkait
Perubahan Permendikbud Nomor 50 tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik	Mengubah pasal 16 ayat 1 menjadi "Sekolah dan dunia kerja menyepakati perihal pemberian jaminan keselamatan dan Kesehatan kerja bagi peserta PKL sesuai denngan perturan perundang-undangan." Hal ini dikarenakan pada pelaksanaannya yidak berjalan secara efektif, cukup banyak industri yang tidak berkenan memberikan jaminankeselamatan kepada peserta PKL, sedangkan Kemendikdasmen tidak dapat memberikan sanksi kepada industry yang tidak menjalankan aturan ini karena industry Adalah ranah Kementerian Perindustrian.	2026	Direktorat SMK

3.4. Kerangka Kelembagaan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi, maka diperlukan dukungan kerangka kelembagaan yang mencakup penataan struktur organisasi, tata kelola, dan manajemen ASN yang efektif serta efisien. Kerangka ini ditujukan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi BBPPMPV Pertanian berjalan optimal, dengan desain organisasi yang selaras dan sasaran strategis, proses kerja yang ringkas dan tepat, serta pencegahan tumpang tindih tugas dan fungsi.

a. Struktur Organisasi BBPPMPV Pertanian

Struktur organisasi BBPPMPV Pertanian masih berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai berikut:

STRUKTUR ORAGNISASI BBPPMPV PERTANIAN



Kerangka kelembagaan adalah perangkat BBPPMPV Pertanian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan untuk: (i) meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan fungsi dan visi/misi BBPPMPV Pertanian; (ii) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Berdasarkan Permendikbud nomor 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang didalamnya termasuk Organisasi dan Tata kerja BBPPMPV. BBPPMPV menyelenggarakan fungsi:

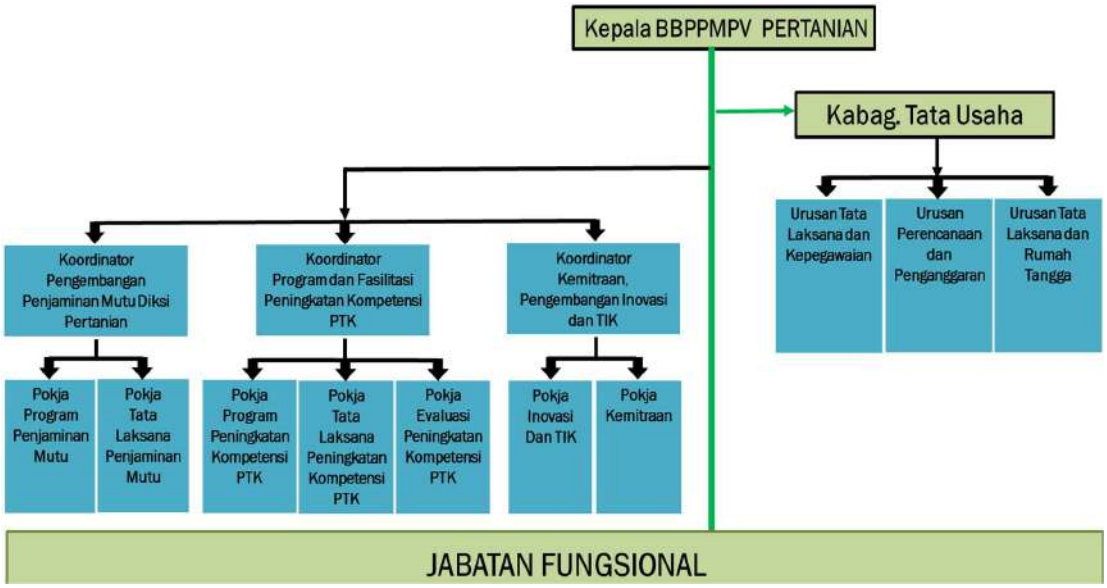
1. penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
2. pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi;
3. pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
4. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi;
5. pengelolaan data dan informasi;
6. pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
7. pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; dan
8. pelaksanaan urusan administrasi.

Berdasarkan pada tugas dan fungsi tersebut, dalam rangka melakukan aktifitas operasionalnya, organisasi BBPPMPV Pertanian terdiri atas:

1. Kepala Balai Besar
2. Bagian Tata Usaha

Selanjutnya, dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BBPPMPV Pertanian, Kepala BBPPMPV Pertanian menetapkan Surat Keputusan Kepala BBPPMPV Pertanian No. 2121/B6.4/HK/2020 Tentang Pengangkatan Koordinator/Sub Koordinator dan Urusan Bagaian Tata Usaha Di Lingkungan BBPPMPV Pertanian Periode 2020 - 2022. Struktur Organisasi BBPPMPV Pertanian dalam SK tersebut adalah sebagai berikut:

Bagan 3.1. Struktur Organisasi BBPPMPV Pertanian
(Permendikbud No. 26 Tahun 2020 dan SK Kepala BBPPMPV Pertanian No. 2121/B6.4/HK/2020)



b. Pengelolaan SDM

Pengejawantahan visi dan misi lembaga yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh warga yang ada merupakan hal penting yang mesti terjadi. Oleh karena itulah BBPPMPV Pertanian berusaha keras untuk dapat melakukan optimalisasi peran dan fungsi setiap individu warga lembaga secara menyeluruh. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan Kemendikdasmen. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis dan terukur.

Disamping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan

profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Kemendikbud juga merupakan hal yang sangat penting. Dengan semangat perubahan menuju ke arah organisasi modern dan lebih baik, strategi pengelolaan SDM di BBPPMPV Pertanian dioerientasikan pada beberapa komponen kerja atau tugas sebagaimana tercantum di bawah ini:

a. Kepala
b. Kabag Tata Usaha
   - Urusan Tatalaksana dan Kepegawaian
   - Perencanaan dan Penganggaran
   - Urusan Tatalaksanana dan Rumah Tangga
c. 9 Tim Kerja
   - Pengembangan Penjaminan Mutu Diksi Pertanian
   - Data, Informassi dan Publikasi Pendidikan Vokasi
   - Kerja Sama dan Penyelarasan Pendidikan Vokasi
   - Fasilitasi Peningkatan Kompetensi PTK Vokasi
   - Agribisinis Perikanan
   - Agiribisnis Peternakan
   - Agribisnis Tanaman Pangan dan Kehutanan
   - Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
   - Sains Terapan, Otomasi Pertanian dan Pengajaran Umum
d. Jabatan Fungsional
   - Widyaiswara
   - Pengembang Teknologi Pembelajaran
   - Arsiparis
   - Perencana
e. Jabatan Pelaksana

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikdasmen. Sebagai bagian integral dari penguatan tata kelola kelembagaan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 di lingkungan Kementerian

Pendidikan Dasar dan Menengah diarahkan untuk memperkuat efektivitas organisasi dalam mendukung pencapaian visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter.

Reformasi Birokrasi dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat organisasi Kementerian mampu memberikan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Program Reformasi Birokrasi Kemendikdasmen Tahun 2025-2029 bertujuan untuk mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (hard competencies dan soft competencies), maupun integritas. Penguatan manajemen dan kinerja menjadi landasan utama dalam membangun birokrasi yang profesional dan adaptif.

Selaras dengan kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi serta mendukung visi pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden, khususnya Asta Cita ke-7 (tujuh) tentang penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan digital yang melayani dan bebas dari korupsi, strategi kelembagaan Kementerian pada periode 2025-2029 menekankan dua dimensi utama Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi General, difokuskan untuk memperkuat internal birokrasi yang efisien, profesional, dan adaptif melalui: penyederhanaan struktur organisasi agar lebih ramping, efisien, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan pendidikan; penguatan tata kelola internal yang berbasis sistem informasi terintegrasi dan pengambilan keputusan berbasis data; manajemen SDM berbasis sistem merit, guna memastikan -88- penempatan dan pengembangan pegawai sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi; transformasi budaya kerja birokrasi, untuk mewujudkan organisasi yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
2. Reformasi Birokrasi Tematik, difokuskan untuk mendukung penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui optimalisasi peran birokrasi. Penguatan reformasi birokrasi menjadi fondasi penting dalam membangun organisasi kementerian yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap tantangan pendidikan nasional.

Transformasi kelembagaan yang terintegrasi dengan agenda reformasi birokrasi akan mempercepat terwujudnya birokrasi yang berdampak (*impactful bureaucracy*), tidak

hanya pada level kebijakan, tetapi hingga pada tataran implementasi di sektor pendidikan. Dengan demikian, arah reformasi birokrasi Kementerian ke depan tidak semata ditujukan pada efisiensi tata kelola, namun juga pada peningkatan kemampuan organisasi untuk menghadirkan layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, merata, dan inklusif, dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemendikdasmen 2025 - 2029, BBPPMPV Pertanian menetapkan tujuan strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap tujuan strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan.

a. Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 (IKK 1.1): Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja

Indikator ini menghitung proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mendapatkan pelatihan kurikulum dan pelatihan berbasis dunia kerja.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari Pendamping Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, Instruktur, Teknisi, Laboran, Pustakawan, dan Tenaga Administrasi. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja ditargetkan meningkat konsisten secara bertahap dari 36,69 (2025), 48,90 (2026), 59,11 (2027), 69,32 (2028) hingga 79,53 (2029).

Tabel 4.1.
Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 BBPPMPV Pertanian Periode Renstra 2025 – 2029

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/RO	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK	**Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja**	**Persen**	**38.69**	**48.90**	**59.11**	**69.32**	**79.53**
7623.SCI.001	Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	318	636	636	636	636

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/RO	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
7623.SCI.002	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	Orang	766	1,971	1,971	1,971	1,971
7623.SCI.004	Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	Orang	37	74	74	74	74

b. Indikator Kinerja Kegiatan 1.2 (IKK 1.2): Jumlah satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya

Indikator ini mengukur jumlah satuan pendidikan vokasi yang mengalami peningkatan mutu berdasar indikator rapor pendidikan.

Mutu Pendidikan Vokasi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan acuan Standar Nasional Pendidikan (PP Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahannya) dan Kepmendikbudristek Nomor 165/M/2021 tentang Program SMK Pusat Keunggulan, dan peraturan serta kebijakan terkait (Link and Match/Keterlibatan dunia kerja).

Pemetaan mutu satuan pendidikan vokasi adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan pada Satuan Pendidikan Vokasi.

Satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya adalah satuan pendidikan yang mendapatkan pendampingan dalam rangka peningkatan nilai pada indikator rapor pendidikan.

Tabel 4.2.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.2 BBPPMPV Pertanian Periode Renstra 2025 – 2029

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/RO	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK	**Jumlah satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya**	**Lembaga**	**288**	**393**	**498**	**602**	**707**
7623.RAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	Paket	1	1	1	1	1
7623.RBI.001	Prasarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	Unit	1	1	1	1	1

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/RO	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
7623.QDB.001	Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	Lembaga	288	393	498	602	707

c. Indikator Kinerja Kegiatan 1.3 (IKK 1.3): Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi

Indikator ini mengukur jumlah model pembelajaran vokasi yang dirancang dan dikembangkan melalui kerja sama dengan mitra dunia kerja dan telah diimplementasikan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan vokasi.

Model pembelajaran yang dikembangkan bersama mitra dunia kerja dapat berupa Model Pembelajaran Berbasis Proyek; Pengembangan Teaching Factory; MOOC (Massive Online Open Courses) untuk diklat bagi SDM pendidikan vokasi; Kredensial Mikro; Gamifikasi; Multimedia Interaktif; dan Pengembangan model pelatihan yang selaras dengan dunia kerja. Dunia kerja meliputi badan usaha, industri, dan lembaga lainnya yang dilibatkan dalam mengembangkan model pembelajaran di satuan pendidikan

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Kegiatan 1.3 BBPPMPV Pertanian Periode Renstra 2025 – 2029

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/RO	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK	**Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi**	**Rekomendasi Kebijakan**	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**
7623.PBH.001	Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	Rekomendasi Kebijakan	2	2	5	6	7
7623.PEC.001	Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	Kesepakatan	14	14	14	14	14

d. Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 (IKK 2.1): Persentase satuan kerja di Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus yang mendapatkan Nilai Kinerja Anggaran sangat baik

Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Menteri Keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran Kementerian/Lembaga sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Penilaian Kinerja Anggaran dilakukan atas:

Penilaian Kinerja atas Perencanaan Anggaran Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terhadap perencanaan anggaran dilakukan dengan mengukur efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran Diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang terdiri atas 3 aspek yaitu kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Nilai Kinerja Anggaran = 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran + 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Kategori Nilai Kinerja Anggaran:

Tabel 4.4.
Kategori Nilai Kinerja Anggaran

Rentang Nilai	Kategori
NKA > 90	Sangat baik
80 < NKA ≤ 90	Baik
60 < NKA ≤ 80	Cukup
50 < NKA ≤ 60	Kurang
NKA ≤ 50	Sangat Kurang

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 BBPPMPV Pertanian Periode Renstra 2025 – 2029

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/RO	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK 2.1.	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian						
7574.EBA	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

e. Indikator Kinerja Kegiatan 2.2 (IKK 2.2): Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP merupakan salah satu bagian program yang dinilai dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Kegiatan 2.2 BBPPMPV Pertanian Periode Renstra 2025 – 2029

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/RO	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK 2.2.	**Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus**	Predikat	A	AA	AA	AA	AA
7574.EBA	**Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus**	Predikat	A	AA	AA	AA	AA

4.2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan BBPPMPV Pertanian dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Kebutuhan pendanaan periode pertana tahun 2025 s.d 2029 sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.7 sebagai berikut.

Tabel 4.7
Kerangka Pendanaan Rencana Strategis BBPPMPV Pertanian 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp.)
1	Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	54.120.219.000

Tabel 4.8
Kerangka Pendanaan Rencana Strategis BBPPMPV Pertanian 2025 – 2029

No.	Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. ribuan)				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKK 1.1	**Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang**	**17,317,578**	**43,585,656**	**43,585,656**	**43,585,656**	**43,585,656**

No.	Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. ribuan)				
		2025	2026	2027	2028	2029
	selaras dengan kebutuhan dunia kerja					
1	Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	1,589,484	3,017,885	3,017,885	3,017,885	3,017,885
2	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	15,087,738	39,306,621	39,306,621	39,306,621	39,306,621
3	Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	640,356	1,261,150	1,261,150	1,261,150	1,261,150
IKK 1.2	**Jumlah satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya**	**5,371,758**	**6,900,304**	**7,821,223**	**8,742,142**	**9,663,061**
1	Sarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	2,373,648	3,443,174	3,443,174	3,443,174	3,443,174
2	Prasarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	1,069,526				
3	Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	1,928,584	3,457,130	4,378,049	5,298,968	6,219,887
IKK 1.3	**Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi**	**681,924**	**681,923**	**745,116**	**808,309**	**871,502**
1	Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	252,773	252,772	315,965	379,158	442,351
2	Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	429,151	429,151	429,151	429,151	429,151

BAB V PENUTUP

Renstra BBPPMPV Pertanian ini disusun dalam rangka Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (Asta Cita no. 4), yang menjadi fokus Presiden dan Wakil Presiden pada RPJMN. Mengacu pada Renstra Kemendikdasmen dalam upaya membawa perubahan:

1. Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua.
2. Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan.
3. Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
4. Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi.

Rencana Strategis ini telah menjabarkan visi dan misi Kemendikdasmen beserta sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Presiden dalam bidang pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu, Renstra Kemendikdasmen menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis Kemendikbud, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra BBPPMPV Pertanian digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan vokasi yang hendak dicapai pada periode 2025-2029. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil dan dampak yang baik dalam lima tahun mendatang. Renstra ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata.

Kemendikdasmen
BBPPMPV Pertanian

LAMPIRAN

#PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA
KEMENDIKDASMEN RAMAH

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
BBPPMPV PERTANIAN
PERIODE 2025 - 2029

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/RO	Satuan	Target					Kerangka Pendanaan (dalam ribuan)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
7623	**Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi**											
7623.PBH.001	Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	Rekomendasi Kebijakan	2	2	5	6	7	252.772	252.772	315.965	379.158	442.351
7623.PEC.001	Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	Kesepakatan	14	14	14	14	14	429.151	429.151	429.151	429.151	429.151
BBPPMPV Pertanian												
SK	**Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi**											
IKK	**Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja**	**Persen**	**38,69**	**48,90**	**59,11**	**69,32**	**79,53**	**17.317.578**	**43.585.656**	**43.585.656**	**43.585.656**	**43.585.656**
7623.SCI.001	Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	318	636	636	636	636	1.589.484	3.017.885	3.017.885	3.017.885	3.017.885
7623.SCI.002	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	Orang	766	1.971	1.971	1.971	1.971	15.087.738	39.306.621	39.306.621	39.306.621	39.306.621
7623.SCI.004	Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	Orang	37	74	74	74	74	640.356	1.261.150	1.261.150	1.261.150	1.261.150
IKK	**Jumlah satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya**	**Lembaga**	**288**	**393**	**498**	**602**	**707**	**5.371.758**	**6.900.304**	**7.821.223**	**8.742.142**	**9.663.061**
7623.RAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	Paket	1	1	1	1	1	2.373.648	3.443.174	3.443.174	3.443.174	3.443.174
7623.RBI.001	Prasarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	Unit	1	1	1	1	1	1.069.526				
7623.QDB.001	Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	Lembaga	288	393	498	602	707	1.928.584	3.457.130	4.378.049	5.298.968	6.219.887
IKK	**Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi**	**Rekomendasi Kebijakan**	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**681.924**	**681.923**	**745.116**	**808.309**	**871.502**
7623.PBH.001	Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	Rekomendasi Kebijakan	2	2	5	6	7	252.773	252.772	315.965	379.158	442.351
7623.PEC.001	Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	Kesepakatan	14	14	14	14	14	429.151	429.151	429.151	429.151	429.151

Lampiran 2

Kerangka Regulasi BBPPMPV Pertanian 2025-2029

ARAH KERANGKA REGULASI DAN ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI YANG BERLAKU, KAJIAN DAN PENELITIAN	TARGET PENYELESAIAN	UNIT ESELON 1 yang terkait
Perubahan Permendikbud Nomor 50 tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik	Mengubah pasal 16 ayat 1 menjadi "Sekolah dan dunia kerja menyepakati perihal pemberian jaminan keselamatan dan Kesehatan kerja bagi peserta PKL sesuai denngan perturan perundang-undangan." Hal ini dikarenakan pada pelaksanaannya yidak berjalan secara efektif, cukup banyak industri yang tidak berkenan memberikan jaminankeselamatan kepada peserta PKL, sedangkan Kemendikdasmen tidak dapat memberikan sanksi kepada industry yang tidak menjalankan aturan ini karena industry Adalah ranah Kementerian Perindustrian.	2026	Direktorat SMK